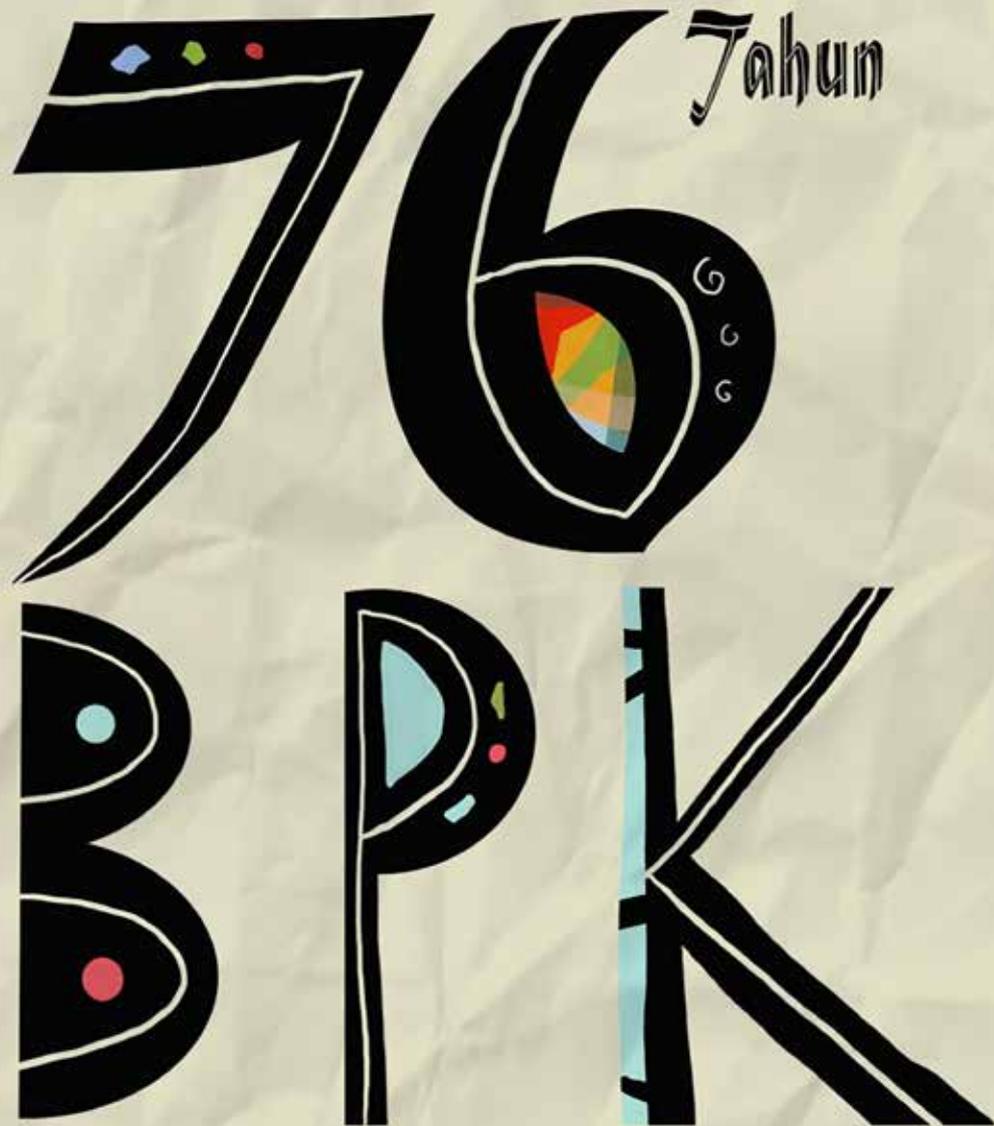




Semakin Kuat dan Hebat

DI TENGAH BERATNYA TANTANGAN SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR AKIBAT PANDEMI COVID-19, BPK TETAP KUKUH MENJALANKAN AMANAH DAN MELAKSANAKAN TUGASNYA.



17 Terus Memberikan Legasi untuk Indonesia

24 BPK Perpanjang Kerja Sama dengan NADM

40 Kewajaran Nilai Subsidi BUMN Jadi Fokus Pemeriksaan



PENGARAH

Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Bambang Supriedi
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Frenny Artiningrum S.
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya
daripihak yang terkait dengan
pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018
tentang Kode Etik BPK)

Edisi Januari 2023 merupakan edisi yang istimewa karena merupakan edisi pertama *Warta Pemeriksa* pada periode tahun 2023. Tak hanya itu, ini juga menjadi tak biasa karena bertepatan dengan rangkaian hari ulang tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Januari.

"Makin Kuat, Makin Hebat" menjadi tema utama rangkaian peringatan HUT BPK kali ini. Tema tersebut dipilih karena mencerminkan harapan serta tekad agar BPK semakin kuat menjalankan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan.

Sejak dibentuk pada 1 Januari 1947 pun, BPK terus berperan mendorong pencapaian tujuan negara melalui fungsi pemeriksaan yang diamanahkan konstitusi. "Juga semakin hebat dengan memberikan karya terbaik dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam upacara peringatan HUT ke-76 BPK, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Melalui edisi ini, pembaca dapat melihat keseruan dan eratnya kekerabatan sesama pegawai BPK. Apalagi perayaan-perayaan sebelumnya masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sehingga, ada keterbatasan kegiatan dan komunikasi di antara sesama pegawai. Kali ini, dengan pembatasan yang semakin longgar, perayaan HUT BPK pun terasa meriah.

Informasi lain yang redaksi siapkan dalam edisi kali ini adalah catatan penting perjalanan BPK sepanjang 2022. Mulai dari rangkaian pemeriksaan rutin yang dijalankan hingga penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI) 20 di Bali, akhir Agustus silam.

Berbagai capaian berhasil diraih BPK sepanjang tahun lalu. Termasuk prestasi gemilang BPK di tingkat internasional. Ketua BPK terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) untuk periode tahun 2023.

Dalam rubrik Menimba Ilmu, redaksi menyiapkan laporan mengenai aturan baru jabatan fungsional (JF). Hal ini terkait dengan sejumlah perubahan dalam pengelolaan JF yang kini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Salah satu perbedaan dari aturan terbaru adalah mengenai tugas JF. Sebelumnya, pejabat fungsional lebih berfokus kepada pemenuhan angka kredit. Sedangkan saat ini, pejabat fungsional difokuskan kepada capaian kinerja organisasi.

Redaksi juga menyiapkan satu rubrik baru yang akan memberikan informasi mengenai kesehatan mental. Rubrik ini merupakan hasil kerja sama dengan Employee Care Center (ECC) dan bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas SDM BPK.

Pada edisi Januari 2023 ini, kami membahas mengenai *hardiness*. Ini merupakan karakteristik kepribadian yang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan memberikan dampak positif terhadap kejadian tersebut.

Terakhir, redaksi juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada BPK yang ke-76. Semoga BPK ke depan dapat terus menjadi lembaga yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selamat menikmati. ~



4 >> Semakin Kuat dan Hebat di Usia 76 Tahun

Di tengah beratnya tantangan selama tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, BPK tetap kukuh menjalankan amanah dan melaksanakan tugasnya.



12 >> Performance Highlight 2022



17 >> Terus Memberikan Legasi untuk Indonesia

BPK terus turut memberikan sumbangsih mengawal pemerintah dalam melewati masa darurat akibat pandemi Covid-19.

- 21 >> Mengenal Aturan Baru Jabatan Fungsional
- 24 >> BPK Perpanjang Kerja Sama dengan NADM
- 25 >> Lanjutkan Legasi BPK, SAI20 India Angkat Isu Ekonomi Biru dan AI yang Bertanggung Jawab
- 28 >> Doa dan Harapan untuk BPK
- 34 >> Membangun Ketahanan Psikologis dalam Bekerja
- 36 >> Transformasi Digital untuk Membantu Pegawai BPK
- 38 >> BPK Cermati Perubahan Postur APBN dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2022
- 40 >> Kewajaran Nilai Subsidi BUMN Jadi Fokus Pemeriksaan
- 42 >> Belajar Moralitas Hukum dari Karya Sastra Eropa Klasik
- 44 >> Berita Foto

Semakin Kuat dan Hebat di Usia 76 Tahun

DI TENGAH BERATNYA TANTANGAN SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR
AKIBAT PANDEMI COVID-19, BPK TETAP KUKUH MENJALANKAN AMANAH
DAN MELAKSANAKAN TUGASNYA.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 76 tahun. Sejak dibentuk pada 1 Januari 1947, BPK terus berperan mendorong pencapaian tujuan negara melalui fungsi pemeriksaan yang diamanahkan konstitusi.

Pada peringatan HUT tahun ini, BPK mengangkat tema "Makin Kuat, Makin Hebat". Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, tema tersebut mencerminkan harapan serta tekad seluruh insan BPK agar BPK semakin kuat menjalankan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan. "Juga semakin hebat dengan memberikan karya terbaik dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua BPK dalam upacara peringatan HUT ke-76 BPK, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023).



Peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan harus terus menjadi prioritas, baik oleh unsur pemeriksaan maupun kelembagaan.



Di tengah beratnya tantangan selama tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, BPK tetap kukuh menjalankan amanah dan melaksanakan tugasnya, yakni pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL).



Bahkan, BPK dapat melaksanakan Pemeriksaan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (atau PC-PEN), selain pemeriksaan tematik atas Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Tahun 2022,





serta prioritas nasional Ketahanan Ekonomi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan Pemeriksaan SDGs 3.8 mengenai pencapaian *universal health coverage*.

"Meskipun mengalami pembatasan pertemuan fisik, dengan penggunaan teknologi informasi dan prosedur alternatif, BPK mampu melakukan seluruh pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan memberikan manfaat berupa *stakeholders confidence*, perbaikan tata kelola keuangan negara, serta kontribusi terhadap pemberantasan korupsi," kata Ketua BPK.

Selain hasil pemeriksaan, BPK telah meraih target capaian kelembagaan yang ditetapkan. Capaian itu terkait tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara, indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan, dan *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi.

Ketua BPK mengatakan, penyerapan anggaran BPK pada 2022 mencapai 99,65 persen, sehingga memperoleh peringkat pertama untuk tingkat kementerian/ lembaga. Capaian ini jauh meningkat jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 yang menduduki peringkat ke-17 dengan persentase penyerapan anggaran 98,83 persen.

Selain capaian tersebut, BPK telah menerima beragam penghargaan, antara lain di bidang pengelolaan keuangan, SDM, kehumasan, hingga penetapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada 2022, Auditorat Utama Investigasi, Perwakilan Provinsi Riau, Jambi, dan Bengkulu berhasil meraih WBBM, bersama satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Badiklat PKN (dahulu Pusdiklat) yang sebelumnya telah memperoleh WBBM.

Untuk WBK, diperoleh AKN V, Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat.





"Dengan demikian, hingga tahun 2022, BPK telah memiliki tujuh satuan kerja berpredikat WBBM dan 33 satuan kerja dengan predikat WBK dari 47 satuan kerja Pembangun Zona Integritas," ujar Ketua BPK.

Di usianya saat ini, BPK pun terus memperkuat pemeriksaan dengan melakukan digitalisasi. BPK telah membangun Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK untuk pemetaan proses bisnis, BPK General Office Automation (BPK GO) untuk integrasi dan kemudahan akses semua aplikasi di BPK, serta pengembangan Big Data Analytics (BIDICS) untuk mendukung pelaksanaan tugas melalui transformasi digital.

Tahun 2022 juga menjadi momentum peningkatan kapasitas melalui kerja sama internasional dengan menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) sebagai *new engagement group* G-20 dan terpilihnya BPK sebagai Chair of United Nations Panel of External Auditors, sebagai satu panel pemeriksa eksternal United Nations, Specialized Agencies and International Atomic Energy Agency.

TANTANGAN

Meski ada banyak pencapaian yang telah diraih BPK, Ketua BPK mengingatkan agar seluruh insan BPK dapat mencermati berbagai tantangan ke depan. Menurut Ketua BPK, ada setidaknya tiga tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Tantangan pertama terkait penegakan nilai-nilai dasar BPK yang perlu memperoleh perhatian dan komitmen bersama, karena akan berdampak pada kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.

"Meskipun beberapa kasus yang terjadi relatif masih kecil proporsinya apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai, namun seperti peribahasa Karena Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga, maka kasus etik dan indisipliner harus segera diproses dan terutama diupayakan pencegahannya karena dapat menggerus *public trust* pada BPK," ujar Ketua BPK.



Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan secara bersamaan perlu terus bersinergi, meningkatkan kolaborasi dan inovasi.





Tantangan kedua terkait dengan optimalisasi penggunaan sumber daya BPK. BPK masih menghadapi tantangan anggaran BPK yang sesuai Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam ketentuan tersebut, anggaran BPK diajukan ke DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN.

Namun, proses anggaran saat ini masih seperti kementerian negara/ lembaga lain, sehingga ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, anggaran BPK masih belum selaras dengan kebutuhan organisasi.

Optimalisasi perlu dilakukan karena BPK telah memperoleh tambahan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana. "BPK pun masih memerlukan pembiayaan yang cukup besar, mengingat kita harus membuka kantor perwakilan pada provinsi pemekaran di Papua dan Papua Barat," katanya.

"Sedangkan tantangan yang ketiga adalah peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan harus terus menjadi prioritas, baik unsur pemeriksaan maupun kelembagaan."

Ketua BPK dalam pidatonya juga mengingatkan bahwa selain ukuran yang telah dilakukan dalam capaian Renstra, BPK perlu mengukur kualitas dan manfaat dari pelaksanaan tugas secara jelas. Tujuannya agar hasil pemeriksaan BPK dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para stakeholder.

Sebagai salah satu upaya perwujudan hal tersebut, akan dilakukan *peer review* pada tahun 2023-2024 oleh badan pemeriksa negara lain yang menjadi anggota organisasi badan pemeriksa sedunia (atau INTOSAI) sesuai ketentuan Pasal 33 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Ketua BPK menekankan, BPK di usia yang ke-76 saat ini, harus terus bertumbuh dan berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan secara bersamaan perlu terus bersinergi, meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Hal ini penting untuk mencapai visi BPK. "Yaitu menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara," kata Ketua BPK.

Upacara peringatan HUT BPK digelar secara daring dan luring. Ketua BPK Isma Yatun bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut diikuti oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I sampai dengan VII, serta para pegawai BPK. Selain itu, upacara dihadiri para undangan, antara lain, para pimpinan BPK periode sebelumnya.

Selain pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan di BPK Pusat dan seluruh BPK Perwakilan, peringatan HUT ke-76 BPK diisi dengan kegiatan sosial, perlombaan antar satuan kerja, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi keluarga besar BPK.

SOSIALISASI

BPK juga melakukan *public awareness* dengan memanfaatkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman, di Jakarta, Minggu (15/1). BPK mengajak pengunjung CFD untuk lebih mengenal tugas dan fungsi BPK dalam mengawal harta negara.

Selain menjadi bagian dari program peningkatan kesadaran publik tentang peran dan tugas BPK, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi BPK agar lebih dekat dengan masyarakat. CFD dipilih agar BPK dapat menjangkau masyarakat luas di ruang publik dari berbagai usia, latar belakang pendidikan, juga pekerjaan, khususnya anak-anak muda yang marak menggunakan media sosial.



Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, masyarakat banyak yang masih belum mengenal BPK, baik terhadap institusi maupun tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, menurutnya kegiatan ini perlu ditingkatkan dan dilakukan secara rutin.

"Kita harus memasukkan kegiatan ini untuk menjadi bagian dari sosialisasi terkait BPK, dan tidak hanya pada HUT BPK, namun dijadikan *strategic process* yang dilakukan per triwulan bahkan tiap bulan," ungkapnya.

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit berharap agar kegiatan serupa dapat lebih ditingkatkan lagi. Menurut Anggota V BPK, dengan kegiatan sosialisasi yang dikemas secara ringan, masyarakat dapat menilai bahwa BPK bukanlah instansi yang kaku.

"Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif yang



harus kita lanjutkan, sehingga BPK dan masyarakat bisa bersilaturahmi dengan baik," kata dia.

Kegiatan di CFD juga dihadiri Ketua BPK Isma Yaton, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto, dan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

Dalam kegiatan ini, BPK menyosialisasikan berbagai media komunikasi yang memudahkan masyarakat lebih dekat dengan BPK. Salah satunya melalui e-PPID, yang dapat diakses melalui gawai yang dimiliki setiap orang. Selain itu masyarakat dikenalkan pada media sosial BPK, yaitu Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok, dan website resmi *bpk.go.id* serta portal berita *wartapemeriksa.bpk.go.id*.

"Ini adalah acara perdana BPK di tahun 2023 yang melibatkan secara langsung masyarakat luas. Dalam acara ini BPK mengenalkan tugas-tugasnya kepada masyarakat sambil berolahraga bersama," ujar Kepala Biro Humas dan KSI, R Yudi Ramdan. ~



BPK RI memperoleh penghargaan sebagai
Anggota JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022 kategori lembaga negara.
Penghargaan diberikan pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH
dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIH Nasional Terbaik Tahun 2022
di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM.



Performance Highlight 2022



>> Auditorat Utama Keuangan Negara I

Jumlah Temuan: **440**

Jumlah Rekomendasi: **1.106**

Rp141.371,23

Nilai Kekurangan Penerimaan (Rp Juta)

Rp45.886,85

Nilai Potensi Kerugian (Rp Juta)

Rp182.378,40

Nilai Kerugian (Rp Juta)

Rp6.238,11

Nilai 3E (Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: 375.874,59 (Rp Juta)

KEGIATAN PEMERIKSAAN

22 Jumlah LHP Keuangan



13 Jumlah LHP Kinerja



31 Jumlah LHP DTT

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

>> Auditorat Utama Keuangan Negara II

Jumlah Temuan: **460**

Jumlah Rekomendasi: **1.221**



Nilai Total Permasalahan: 6.500.629,94 (Rp Juta)

KEGIATAN PEMERIKSAAN

27 Jumlah LHP Keuangan >> **8** Jumlah LHP Kinerja >> **12** Jumlah LHP DTT

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

>> Auditorat Utama Keuangan Negara III

Jumlah Temuan: **847**

Jumlah Rekomendasi: **2.361**



Nilai Total Permasalahan: 9.634.003,62 (Rp Juta)

KEGIATAN PEMERIKSAAN

48 Jumlah LHP Keuangan >> **13** Jumlah LHP Kinerja >> **17** Jumlah LHP DTT

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

>> Auditorat Utama Keuangan Negara IV

Jumlah Temuan: **259**

Jumlah Rekomendasi: **669**

Rp12.805.320,01

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

Rp270.272,74

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

Rp270.476,84

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: 13.346.069,59 (Rp Juta)

KEGIATAN PEMERIKSAAN

30 Jumlah LHP Keuangan



5 Jumlah LHP Kinerja



7 Jumlah LHP DTT

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

>> Auditorat Utama Keuangan Negara V

Jumlah Temuan: **5.500**

Jumlah Rekomendasi: **15.965**

Rp667.376,07

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

Rp386.547,59

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

Rp1.080.060,15

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

Rp73.716,27

Nilai 3E
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: 2.207.700,08 (Rp Juta)

KEGIATAN PEMERIKSAAN

293 Jumlah LHP Keuangan



154 Jumlah LHP Kinerja



72 Jumlah LHP DTT

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

>> Auditorat Utama Keuangan Negara VI

Jumlah Temuan: **5.232**Jumlah Rekomendasi: **14.261**

Nilai Total Permasalahan: 3.833.093,57 (Rp Juta)

KEGIATAN PEMERIKSAAN

263 Jumlah LHP Keuangan >> **159** Jumlah LHP Kinerja >> **59** Jumlah LHP DTT

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

>> Auditorat Utama Keuangan Negara VII

Jumlah Temuan: **975**Jumlah Rekomendasi: **2.492**

Nilai Total Permasalahan: 13.819.158,41 (Rp Juta)

KEGIATAN PEMERIKSAAN

2 Jumlah LHP Keuangan >> **6** Jumlah LHP Kinerja >> **65** Jumlah LHP DTT

ENTITAS YANG DIPERIKSA



BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

>> Auditorat Utama Investigasi

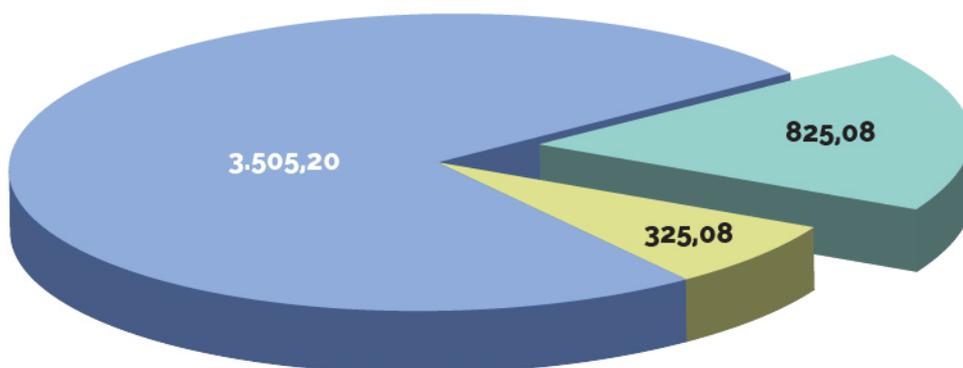
KEGIATAN PEMERIKSAAN

	Penghitungan Kerugian Negara	Pemberian Keterangan Ahli pada Tahap Penyidikan	Pemberian Keterangan Ahli pada Persidangan
Pusat	5	45	11
Daerah & BUMD	28	61	87
BUMN	7	48	69
Total	40	154	167

Nilai Kerugian Negara/Daerah (dalam miliar)

- Pusat
- Daerah & BUMD
- BUMN

Total: 4.655,36



PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI/PKN/PKA OLEH INSTANSI BERWENANG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

50

Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (PI)



- 18 LHP PI digunakan untuk Tahap Penyelidikan
- 32 LHP PI digunakan untuk Tahap Penyidikan

604

Pemanfaatan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN)



- 98 LHP PKN digunakan untuk Tahap Penyidikan
- 506 LHP PKN digunakan untuk Tahap Penyidikan yang sudah lengkap (P-21)

618

Pemanfaatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Persidangan



- 618 PKA digunakan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terus Memberikan Legasi untuk Indonesia

**BPK TERUS TURUT MEMBERIKAN SUMBANGSIH MENGAWAL PEMERINTAH
DALAM MELEWATI MASA DARURAT AKIBAT PANDEMI COVID-19.**



■ Ketua BPK Isma Yatun dalam pidato saat penyerahan IHPS Semester II Tahun 2021 ke lembaga perwakilan

Indonesia mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi Covid-19. Lantaran pandemi, bisa dikatakan tantangan yang dihadapi seluruh elemen masyarakat sangat berat. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, pangan, dan sektor-sektor krusial lainnya.

Berbagai krisis yang bertubi-tubi pun mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera. Contohnya, untuk merespons kondisi tersebut, anggaran publik harus direalokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa.

Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dalam kondisi krisis seperti ini biasanya banyak kesempatan untuk berbuat penyelewengan terhadap keuangan negara. Dibutuhkan respons yang cepat dan efektif dalam menyikapi berbagai situasi sulit yang dihadapi.

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Pemeriksaan BPK didasarkan kepada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu RPJMN 2020-2024.

Setelah beberapa tahun hidup dalam kondisi pandemi, Indonesia pun mulai berbenah. BPK patut berbangga karena terus turut memberikan sumbangsih mengawal pemerintah

dalam melewati masa darurat akibat pandemi Covid-19.

Pada semester II tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. "BPK terus berupaya keras untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik internasional terbaik," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam pidato saat penyerahan IHPS semester II tahun 2021 ke lembaga perwakilan.

Akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara pada masa krisis terlihat dari uji kualitas pertanggungjawaban anggaran/keuangan negara atau opini. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas pertanggungjawaban anggaran 2021. Opini WTP ini diberikan kepada 83 kementerian/lembaga (K/L) dari total 87 K/L. Kemudian kepada 500 pemerintah daerah (pemda) dari total 542 pemda yang ada.

OPINI WTP BPK ATAS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 2021

Opini WTP diberikan kepada
83 K/L dari total **87 K/L**.



Kemudian kepada **500 pemda**
dari total **542 pemda** yang ada.

Akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara ini telah menghasilkan *output* dan *outcome* yang baik, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran tercatat sudah mulai turun setelah sebelumnya naik ke level *double digit* akibat pandemi. Bahkan Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi pulih luar biasa pada kuartal I dan II 2022 pada saat seluruh dunia saat ini melemah.

Seiring dengan kondisi yang semakin membaik, tentunya kita semua senantiasa berharap dan berdoa agar segala upaya kolaboratif yang telah dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19, bangsa Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

Dedikasi BPK pun mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khususnya terkait sinergi BPK dan pemerintah dalam menghadapi krisis. "BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta (16/8/2022).

HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pada 2022, BPK terus menjalankan upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara dengan mengedepankan nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Pada uji kinerja dan kepatuhan uang dilakukan BPK, sejak 2005 hingga semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar Rp302,56 triliun.

Jumlah Rekomendasi BPK

Sejak 2005 hingga semester I 2022, BPK telah menyampaikan **660.894** rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar **Rp302,56 triliun**.



BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah.

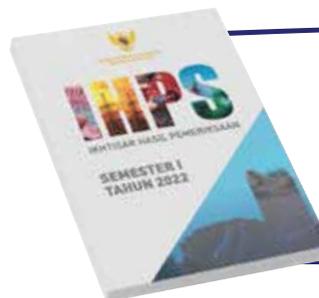
Secara kumulatif hingga semester I 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan tercatat sebesar Rp124,60 triliun. Capaian tersebut menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK yang dapat diukur dengan uang sekaligus perwujudan komitmen entitas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan bernegara.

Seperti diketahui, salah satu indikator kinerja BPK adalah melalui ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). Untuk IHPS II tahun 2021 dan IHPS I tahun 2022, memuat ringkasan dari 1.306 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 685 LHP keuangan, 358 LHP kinerja, dan 263 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). BPK pun mengungkap 13.713 temuan yang memuat 21.685 permasalahan sebesar Rp49,71 triliun.

IHPS II Tahun 2021 dan IHPS I Tahun 2022

Memuat ringkasan dari **1.306** LHP.

Terdiri atas **685** LHP keuangan, **358** LHP kinerja, dan **263** LHP dengan tujuan tertentu (DTT).



BPK pun mengungkap **13.713** temuan yang memuat **21.685** permasalahan sebesar **Rp49,71 triliun**.

Di dalam IHPS juga dapat terlihat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-semester I 2022 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun. Tingkat penyelesaian menunjukkan bahwa telah dilakukan pelunasan sebesar Rp2,26 triliun. Kemudian dalam proses angsuran sebesar Rp365,22 miliar dan penghapusan sebesar Rp84,68 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,84 triliun atau 40% dari total kasus kerugian negara/daerah.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2022

- ➔ Telah ditetapkan sebesar **Rp4,56 triliun**.
- ➔ Telah dilakukan pelunasan sebesar **Rp2,26 triliun**.
- ➔ Dalam proses angsuran sebesar **Rp365,22 miliar**.
- ➔ Penghapusan sebesar **Rp84,68 miliar**.
- ➔ Masih terdapat sisa kerugian sebesar **Rp1,84 triliun** atau **40%** dari total kasus kerugian negara/daerah.



BPK pun ikut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pemeriksaan investigasi. Untuk periode 2017-semester I 2022, BPK telah mengeluarkan 25 LHP investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan serta penyidikan.



Capaian Opini WTP Lampau Target RPJMN



Bukti kinerja BPK juga terlihat dari penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu mengapresiasi BPK yang tercatat mendapatkan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) tahun 2021 dan meraih WTP 15 kali berturut-turut sejak LK tahun 2007.

Menjelang akhir tahun 2022, BPK kembali meraih penghargaan. Kali ini, BPK mendapat 4 predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI). Dengan demikian, sampai dengan 2022, BPK telah memiliki tujuh satker yang berpredikat WBBM, yaitu Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pusdiklat BPK.

JEJAK BPK DI DUNIA

Tahun 2022 menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan prinsip kolaborasi dan sinergi. Karena pada tahun ini Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi

Presidensi G20 2022. BPK ikut memberikan dukungan dan kontribusi terhadap Presidensi G20 2022 dengan menginisiasi Supreme Audit Institution 20 (SAI20). Ini merupakan engagement group (EG) yang dibentuk pada 2022 dalam periode Presidensi G20 Indonesia. SAI20 Summit pun sukses digelar di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022.

Kita patut berbangga dengan terselenggaranya acara bersejarah ini. Karena SAI20 telah menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ikut menghadiri dan membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI20 di Bali (29/8/2022).

"Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia," kata dia. Wapres pun menambahkan bahwa hal ini menjadi nilai tambah bagi komunitas global dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih tangguh dan kolaborasi yang efektif antara BPK dan pemerintah.

KTT SAI20 mengesahkan *rules of procedure* (RoP) atau aturan internal, dan 12 poin komunike (pernyataan bersama) yang disampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 November 2022.

Prestasi gemilang lain BPK di tingkat internasional yaitu terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) untuk periode tahun 2023. ~



Dalam BKN Awards 2022 yang diadakan pada 21 Juli 2022 di Batam, BPK memperoleh tiga penghargaan yaitu:



Peringkat 1

atas capaian dalam perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian.



Peringkat 4

atas capaian dalam penerapan pemanfaatan data-sistem informasi dan CAT.



Implementasi Manajemen ASN Terbaik.



DOK YOUTUBE @KEMENTERIANPANRBBIROHUKIP

Mengenal Aturan Baru Jabatan Fungsional

DALAM REGULASI TERBARU, PEJABAT FUNGSIONAL DIFOKUSKAN PADA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan regulasi baru mengenai jabatan fungsional (JF). Terdapat sejumlah perubahan dalam pengelolaan JF yang kini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Beleid tersebut merupakan penyempurnaan dari PermenPANRB Nomor 13/2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). MenPANRB Azwar Anas mengatakan, PermenPANRB Nomor 1/2023 merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasi tata kelola jabatan fungsional.

Azwar menjelaskan, salah satu perbedaan dari aturan terbaru adalah mengenai tugas JF. Sebelumnya, pejabat fungsional lebih berfokus pada pemenuhan angka kredit. Sedangkan saat ini, pejabat fungsional difokuskan pada capaian kinerja organisasi.

Tidak ada lagi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja.

"Tidak ada lagi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja," kata Azwar dalam sosialisasi PermenPANRB Nomor 1/2023 di Jakarta, akhir Januari.

Perubahan lainnya, pemerintah menambahkan ketentuan bahwa kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional. Adapun pada aturan sebelumnya, kenaikan pangkat luar biasa hanya berlaku bagi jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan administratif (JA).

Azwar menekankan, perubahan aturan ini merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi yang terdiri atas dua hal. Pertama, dengan menyederhanakan birokrasi menjadi dua level eselon. Kedua, peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.

Penyederhanaan birokrasi tersebut membuat jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) didominasi jabatan fungsional. Dia memerinci, jumlah jabatan fungsional saat ini sebanyak 2,1 juta ASN atau mencapai 58 persen. Sedangkan pelaksana sebanyak 1,5 juta ASN (42 persen).

Perubahan Tata Kelola Jabatan Fungsional

PERMENPANRB 13/2019

PERMENPANRB 1/2023



Sumber: KemenpanRB

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyambut baik adanya penyederhanaan birokrasi melalui transformasi tata kelola jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan berdampak luas terhadap transformasi institusi terhadap pemerintahan. Pemerintahan juga diharapkan menjadi bersih, akuntabel dan berkinerja bersih, efektif, efisien serta menciptakan pengalaman unik yang berkualitas.

"Dengan terbitnya PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional diharapkan memberikan lompatan besar terhadap percepatan reformasi birokrasi, dan transformasi institusi, yang sedang dan terus kita laksanakan," kata John Wempi.

Dengan adanya aturan ini, kata dia, pola pikir pejabat harus berubah dari yang tadinya berorientasi pada angka kredit menjadi berorientasi pada kinerja. Ini akan membuat ASN menjadi lebih lincah, dinamis dan produktif, serta memiliki dampak langsung pada indikator kinerja institusi.

Dengan terbitnya PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional diharapkan memberikan lompatan besar terhadap percepatan reformasi birokrasi, dan transformasi institusi, yang sedang dan terus kita laksanakan.



■ Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo

Dia menambahkan, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 akan efektif dalam mengubah komposisi jabatan yang ada di pemerintah daerah saat ini. "Pemerintah daerah diharapkan pahami, pelajari dan konsultasikan kepada Kemendagri dan KemenPANRB soal hal ini," tutur dia.

Satu hal yang Kemendagri nilai penting dari beleid ini adalah pejabat pemerintah tidak boleh lagi disibukkan dengan hal-hal bersifat administratif yang tidak berdampak langsung dengan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, ia menilai aturan baru jabatan fungsional akan berdampak positif kepada birokrasi pemerintahan serta kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM. ~

TUGAS DAN RUANG LINGKUP JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Pelayanan teknis fungsional berbasis keahlian dan keterampilan tertentu pada unit organisasi.
- 2 Penyusunan ruang lingkup setiap jenjang jabatan fungsional.
- 3 Pemenuhan ekspektasi kinerja.

KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Jabatan fungsional berkedudukan di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), administrator, pengawas, dan pejabat fungsional lain.
- 2 Pejabat fungsional bekerja dalam sistem kerja kolaboratif, baik dalam atau lintas unit organisasi.
- 3 Mendukung pada organisasi yang tangkas dan dinamis.

BPK Perpanjang Kerja Sama dengan NADM

IMPLEMENTASI KERJA SAMA BILATERAL BPK DAN NADM TELAH TERJALIN SELAMA LEBIH KURANG 15 TAHUN SEJAK PENANDATANGANAN MOU PADA NOVEMBER 2007.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) dengan The National Audit Department of Malaysia (NADM) pada Senin (30/1/2023). Penandatanganan ini melanjutkan kerja sama bilateral dua lembaga di bidang pemeriksaan sektor publik.

Penandatanganan MoU dilakukan secara daring. Ketua BPK Isma Yatun berada di Jakarta (Indonesia) sementara Auditor General of Malaysia Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid di Putrajaya (Malaysia).

Implementasi kerja sama bilateral BPK dan NADM telah terjalin selama lebih kurang 15 tahun sejak penandatanganan MoU pada November 2007. Terakhir, kerja sama tersebut diperbarui pada 12 Februari 2017 dan telah kedaluwarsa sejak 12 Februari 2021.

Dalam sambutannya, Ketua BPK mengapresiasi Auditor General of Malaysia atas kontribusi dan peran aktif NADM. Baik dalam forum ASEANSAI, ASOSAI, dan INTOSAI. Dia juga menekankan bahwa NADM merupakan sahabat dan mitra strategis BPK di kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan bersama.

Di lain pihak, Auditor General of Malaysia juga mengapresiasi peran aktif BPK dalam komunitas SAI internasional. Dia juga menyatakan dukungannya atas pencalonan BPK sebagai ketua INTOSAI pada tahun 2028.



■ Penandatanganan MoU oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Auditor General of Malaysia Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid dilakukan secara daring.

Selain penandatanganan MoU, BPK dan NADM juga menyelenggarakan pertemuan teknis ke-21 untuk berbagi pengetahuan mengenai *remote auditing* dan *follow-up audit*. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman bertindak selaku moderator.

Sementara narasumber yang memaparkan tentang *remote auditing* yaitu Kepala Auditorat IIA, Winarno yang didampingi Thopan Aji P dan Reza Aryanto. Selanjutnya paparan mengenai *follow up audit* disampaikan oleh Director of Follow Up Audit NADM, Mohd Serjana Ibrahim.

Pada akhir sesi pertemuan, BPK dan NADM membahas topik implementasi kerja sama bilateral selanjutnya. Beberapa kemungkinan topik yang akan diusulkan untuk dibahas pada pertemuan teknis ke-22 termasuk *audit on sharia compliance*, *audit of hajj financial management conducted by Tabung Haji Malaysia*, *follow-up audit*, dan *audit on forest management*.

Melalui penyelenggaraan kedua kegiatan ini, BPK berharap kerja sama yang baik dengan NADM dapat terus berlanjut. Termasuk juga membawa manfaat bagi pengembangan kapasitas pemeriksaan kedua institusi.

Dalam penandatanganan tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif dan Auditor Utama Keuangan Negara II Nelson Ambarita. Sedangkan Auditor General of Malaysia didampingi oleh Deputy Auditor General of Malaysia, Roslan Abu Bakar dan Director of International Relations, Research, & Quality Assurance Review Division, Sayed Alwee Hussnie. ~



Lanjutkan Legasi BPK, SAI20 India Angkat Isu Ekonomi Biru dan AI yang Bertanggung Jawab

CAG INDIA MENGUSULKAN DUA HAL PRIORITAS YANG BISA DIANGKAT DALAM FORUM MULTILATERAL SAI20.

Badan Pemeriksa Keuangan secara resmi telah menggelar serah terima Presidensi Supreme Audit Institution 20 (SAI20) kepada Office of Comptroller and Auditor General (CAG) of India, pada Selasa (31/1/2023) secara virtual. Kegiatan serah terima ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif kepada dan Deputi Comptroller and Auditor General of India, Parveen Mehta. Selain delegasi dari kedua institusi tersebut, hadir Duta Besar RI untuk India Ina Hagniningtyas Krisnamurthi dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.



■ Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif



Kami dengan senang hati menyerahkan tongkat estafet kepresidenan kepada Office of Comptroller and Auditor General of India.



■ Deputy Comptroller and Auditor General of India, Parveen Mehta



Oleh karena itu saya sangat senang untuk memberi tahu Anda semua bahwa melanjutkan dari sebelumnya (SAI20 di Indonesia), SAI20 akan juga digelar dalam Presidensi India G20.

Sekjen BPK Bahtiar Arif dalam sambutannya mengaku merasa terhormat bisa mewakili Indonesia untuk menyerahkan Presidensi SAI20 kepada CAG of India. "Kami dengan senang hati menyerahkan tongkat estafet kepresidenan kepada Office of Comptroller and Auditor General of India," kata Bahtiar.

Ia menambahkan, di bawah Presidensi G20 Indonesia, BPK berhasil membentuk SAI20. Selain itu dengan dukungan penuh dari anggota, BPK sukses mengesahkan *Rules of Procedures* (RoP) sebagai pedoman keberlanjutan SAI20. SAI20 Indonesia juga menghasilkan *communiqué* sebagai rekomendasi untuk pemerintahan G20.

"Kami percaya bahwa lembaga pengawasan keuangan India, yaitu CAG India akan menjaga komitmen bersama dalam mempromosikan tata kelola yang tepat dan akuntabel dengan semangat 'One Earth, One Family, and One Future'."

Deputy Comptroller and Auditor General of India Parveen Mehta menyatakan, G20 adalah panggung multilateral strategis yang menghubungkan antara negara maju dan negara berkembang. G20, tutur dia, memegang peran strategis dalam menjaga masa depan pertumbuhan ekonomi dan



kekayaan dunia. Anggota G20 mewakili 80 persen dari total PDB dunia, 75 persen perdagangan dunia, dan 67 persen dari total populasi dunia.

"Oleh karena itu saya sangat senang untuk memberi tahu Anda semua bahwa melanjutkan dari sebelumnya (SAI20 di Indonesia), SAI20 akan juga digelar dalam Presidensi India G20," ungkap dia.

Di bawah Presidensi India, G20 akan fokus kepada pertumbuhan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Selain itu, konsep LIFE, infrastruktur publik digital, dan pembangunan berbasis teknologi di berbagai bidang mulai dari kesehatan, pertanian, pendidikan dan lain-lain.

CAG India mengusulkan dua hal prioritas yang bisa diangkat dalam forum multilateral SAI20. Pertama adalah mengenai ekonomi biru. Sedangkan yang kedua adalah penggunaan *artificial intelligence* (AI) yang bertanggung jawab. "Dua hal ini mencerminkan isu-isu yang sangat penting dan butuh kolaborasi cepat yang nyata," ungkap dia.

Pada kesempatan ini, BPK juga melakukan *knowledge transfer* terkait pengalaman BPK dalam membentuk dan mengetahui SAI20 pada 2022. Sesi presentasi ini diwakili Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R Yudi Ramdan Budiman. Dalam presentasinya, ia menjelaskan kegiatan-kegiatan SAI20 di tahun 2022, proses komunikasi dengan SAI lain dan *stakeholders*, lalu mengenai bagaimana pembagian tim dan tugasnya, serta media komunikasi resmi yang digunakan. ~

Majalah bulanan Warta Pemeriksa
mendapat penghargaan dalam

The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Berlangsung di Jawa Tengah,
pemberian penghargaan
dilaksanakan pada 25 Maret 2022.



Doa dan Harapan untuk BPK

UNTAIAN DOA DAN HARAPAN MENGALIR UNTUK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) YANG PADA 1 JANUARI 2023 GENAP BERUSIA 76 TAHUN. SELURUH INSAN BPK DIHARAPKAN SEMAKIN KUAT DAN SEMAKIN HEBAT DALAM MENGAWAL KEUANGAN NEGARA SERTA PEMBANGUNAN NASIONAL.



BPK BERPERAN WUJUDKAN INDONESIA MAJU

Selama 76 tahun Badan Pemeriksa Keuangan berkiprah di Republik Indonesia, BPK bukan hanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga memastikan keuangan negara digunakan secara efisien, secara efektif, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga agar pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Indonesia Maju. Selamat ulang tahun ke-76 BPK. Semoga BPK selalu dapat menjaga independensi, integritas, dan profesionalismenya. BPK makin kuat, makin hebat.

Presiden RI, Joko Widodo



AKTIF MENGAWAL VISI PEMBANGUNAN

Terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan 76 tahun yang lalu merupakan wujud komitmen penegakan integritas dan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara. Kini kita tengah berjuang merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Saya harap BPK RI dan segenap jajaran dapat berperan aktif mengawal visi pembangunan ini seraya merawat integritas dan kepercayaan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Di sisi lain, era keterbukaan turut memberi peluang bagi BPK RI dan para auditor keuangan negara untuk menjaga eksistensi dan relevansi dengan tuntutan zaman. BPK RI diharapkan terus responsif, adaptif, serta membuka ruang untuk melakukan pendekatan yang inovatif tentunya tetap junjung tinggi profesionalisme, independensi dan prinsip tata kelola yang baik. Kepada seluruh insan BPK, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-76, semoga BPK RI semakin kuat, makin hebat, dan menjadi lembaga pemeriksa terpercaya dalam menjaga tata kelola keuangan negara.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin





TERUS MEMBAWA PERUBAHAN POSITIF

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK RI merupakan lembaga yang telah kokoh berdiri menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme dalam mewujudkan akuntabilitas kita semua.

Saya meyakini berbagai pencapaian BPK yang telah diraih dan didorong dengan semangat makin hebat, makin kuat, BPK akan terus membawa perubahan positif untuk masa depan Indonesia yang cerah. Dirgahayu BPK Republik Indonesia.

————— **Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo**



KAWAL KEUANGAN NEGARA DEMI PEMBANGUNAN BANGSA

Selamat ulang tahun ke-76 untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Perayaan ulang tahun ini harus dijadikan refleksi dan evaluasi agar BPK tumbuh semakin kuat dan semakin hebat.

Sebagai badan yang mengawal pengelolaan keuangan negara, BPK harus terus berjalan di atas koridor undang-undang dan memastikan keuangan negara digunakan untuk pembangunan bangsa serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Sekali lagi selamat ulang tahun untuk BPK, makin kuat, makin hebat.

————— **Ketua DPD, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti**



SEMAKIN TANGGUH DAN TERUS BERTUMBUH

76 tahun adalah waktu yang tidak singkat. Selama itu BPK telah menunjukkan bukti nyata pengabdianya kepada negara. Saya mengucapkan selamat kepada BPK atas semangat dan kerja keras yang berwujud nyata.

Semoga di usia yang ke 76, BPK semakin tangguh dan terus bertumbuh dalam menjaga keuangan negara. Dirgahayu BPK ke-76.

————— **Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin**





JUNJUNG TINGGI INDEPENDENSI

76 tahun bukan waktu yang singkat. Badan Pemeriksa Keuangan telah menunjukkan bukti nyata pengabdian kepada negara serta senantiasa menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme. Dirgahayu BPK, makin kuat, makin hebat.

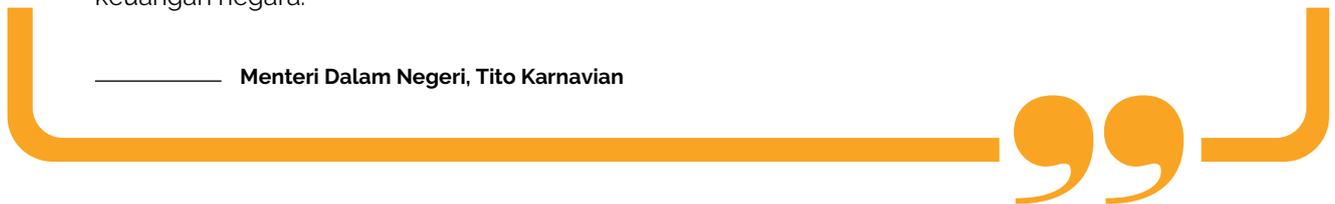
_____ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto



TELADAN DALAM TRANSPARANSI

Saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK dan jajaran atas semangat, kerja keras selama ini khususnya dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas. Semoga di usia yang cukup dewasa ini BPK akan semakin matang, tangguh, dan terus berkembang dalam rangka menjaga tata kelola keuangan negara serta sekaligus menjadi contoh dan teladan dalam transparansi dan akuntabilitas khususnya pengelolaan keuangan negara.

_____ Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian



PEMBERI JAWABAN TERHADAP TANTANGAN

BPK adalah institusi yang terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar terus transparan, akuntabel, dan efektif sebagai instrumen penting untuk membangun Indonesia mewujudkan cita-citanya menjadi negara yang maju, bermartabat, adil, dan makmur.

Sebagai *supreme audit institution*, BPK bersama seluruh jajaran pemerintah yang lain mengawal pelaksanaan dan tata kelola keuangan negara.



Saya sangat menghargai peran BPK yang terus mengawal agar instrumen keuangan negara selalu menjadi instrumen yang berkualitas. BPK selalu menjadi pemberi jawaban terhadap tantangan yang dihadapi oleh Indonesia hari ini dan kedepan, apakah itu pandemi, apakah itu perubahan iklim, apakah perubahan teknologi, geopolitik, maupun perubahan perekonomian dan demografi. Kami dari Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang luar biasa selama ini.

Mari kita bersinergi, bahu membahu mengelola keuangan secara kredibel, akuntabel, berintegritas dan profesional demi Indonesia maju dan sejahtera, adil dan bermartabat. Dirgahayu BPK.

_____ Menteri Keuangan, Sri Mulyani



TELADAN AKUNTABILITAS

Selama 76 tahun, banyak kontribusi yang diberikan oleh BPK bagi Indonesia. Semoga BPK terus menjadi lembaga yang menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme. Serta senantiasa menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lain di Indonesia dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

_____ Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin



BPK PUNYA ANDIL DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN

BPK terus memberikan kontribusi luar biasa, mendorong peningkatan kualitas pencapaian lembaga pemerintahan di Indonesia. Khususnya melalui upaya-upaya yang dilakukan BPK dalam mendorong dan memastikan setiap lembaga pemerintah menjalankan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan transparan. Capaian kami di Kemendikbudristek dalam meluncurkan dan mengimplementasi 22 terobosan Merdeka Belajar selama tiga tahun terakhir juga tidak terlepas dari peran BPK.

Andil besar BPK dalam transformasi pendidikan di Indonesia adalah menjaga agar setiap program Merdeka Belajar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyasar penerima manfaat secara tepat, dan memiliki prospek implementasi yang berkelanjutan. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan pegawai di BPK atas bimbingan dan arahan untuk terus memberikan bimbingan kepada kami untuk memastikan program yang kami jalankan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami di Kemendikbudristek juga berkomitmen untuk memastikan program Merdeka Belajar berjalan sesuai dengan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Selamat ulang tahun ke-76 untuk BPK, sukses selalu untuk maju lebih kuat dan lebih hebat membawa Indonesia melompat ke masa depan.

_____ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim



SEPENUH HATI WUJUDKAN AKUNTABILITAS

Kami mengucapkan selamat kepada BPK atas pencapaian dan kerja keras selama 76 tahun sampai tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah bekerja sepenuh hati, sekuat tenaga untuk mewujudkan akuntabilitas bagi semua. Semoga di usia ke-76, BPK semakin tangguh dan terus bertumbuh dalam menjaga keuangan negara. BPK makin kuat, makin hebat.

_____ Menteri Sosial, Tri Rismaharini





SELALU SETIA JUNJUNG INTEGRITAS, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME

76 tahun adalah waktu yang tidak singkat dan BPK telah menunjukkan bukti nyata pengabdian kepada negara. Saya menyampaikan selamat kepada keluarga besar BPK atas semangat dan kerja keras yang terwujud nyata. Selalu setia menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Semoga BPK makin kuat, makin hebat.

_____ Menteri Agama, **Yaqut Cholil Qoumas**



MEMBIMBING UNTUK PERBAIKAN KINERJA

Kami keluarga besar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, turut bangga atas pencapaian BPK melalui kerja keras selama ini. BPK tidak hanya mengaudit, tapi juga membina kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya untuk terus memperbaiki kinerjanya. Selamat ulang tahun ke-76 BPK. Selalu junjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Dirgahayu BPK.

_____ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi, **Abdullah Azwar Anas**



MENJADI PERCONTOHAN PENGABDIAN

Selama 76 tahun BPK telah menunjukkan bukti nyata pengabdian kepada negara dengan visi mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Kontribusi nyata BPK dalam mewujudkan pembangunan nasional diwujudkan salah satunya melalui pencapaian rencana pembangunan nasional 2020-2024 dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Indonesia merupakan negara yang cukup luas, tentu saja tata kelola keuangan negaranya perlu dijaga sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama melalui serangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Bappenas turut bangga atas berbagai pencapaian BPK yang diraih dengan kerja keras selama 76 tahun ini. Semoga BPK kian tangguh dan terus tumbuh selama menjaga keuangan negara, selalu terdepan dan menjadi percontohan dalam melakukan pengabdian terhadap negara. Terus melangkah dan membawa perubahan demi masa depan Indonesia yang cerah. Menjadi lembaga yang terus setia kepada tugas dan tanggung jawab untuk Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai.

_____ Menteri PPN/Kepala Bappenas, **Suharso Monoarfa**





JANGAN BERHENTI BERINOVASI

Selamat ulang tahun ke-76 untuk BPK RI. BPK telah menunjukkan semangat independensi, integritas, dan profesionalisme selama 76 tahun pengabdian dalam menjaga tata kelola keuangan negara. Melalui *check and balance* dari BPK, tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Semoga di usia yang semakin matang ini, BPK dapat tumbuh semakin tangguh serta terus berinovasi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab. Dirgahayu BPK RI, makin kuat, makin hebat.

———— Menteri BUMN, Erick Thohir



TERUS MELANGKAH DAN MEMBAWA PERUBAHAN

BPK selama 76 tahun secara luar biasa telah menunjukkan bukti nyata pengabdian dalam mewujudkan akuntabilitas negara. Kami keluarga besar Bank Indonesia turut bangga atas berbagai pencapaian BPK RI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI atas kerja sama yang begitu erat dan berbagai masukan yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Kami berharap BPK RI terus melangkah maju dan sukses membawa perubahan demi Indonesia yang maju, sejahtera dan bertata kelola.

———— Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo



BPK JADI TITIK SENTRAL

BPK memegang peranan penting dalam tata kelola keuangan negara. Sebagai lembaga pemeriksa, BPK menjadi titik sentral agar seluruh anggaran bisa digunakan dengan semestinya dan sebaik-baiknya. Selamat ulang tahun ke-76 untuk BPK. Tetap teguh menjaga kapabilitas dan integritas.

———— Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo



SEMAKIN TANGGUH MENJAGA KEUANGAN NEGARA

Saya menghaturkan selamat ulang tahun ke-76 untuk BPK. Semoga di usia ke-76, BPK semakin tangguh menjaga keuangan negara demi mewujudkan tata kelola keuangan organisasi yang transparan, berkesinambungan dan BPK terus menjadi teladan bagi institusi lainnya.

———— Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil



Membangun Ketahanan Psikologis dalam Bekerja

DENGAN MEMILIKI *HARDINESS*, SESEORANG TAK AKAN MUDAH
MENGALAMI STRES APABILA MENGALAMI HAL TIDAK MENYENANGKAN.

Kepribadian yang tangguh (*hardiness*) penting dimiliki seseorang, termasuk pekerja. Lalu, apa saja ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian tangguh?

Employee Care Center (ECC) dalam kegiatan diskusi pada Januari 2023 secara khusus membahas mengenai *hardiness*. Dalam diskusi tersebut diungkapkan bahwa *hardiness* adalah karakteristik kepribadian yang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan memberikan dampak positif terhadap kejadian tersebut.

Dengan memiliki *hardiness*, seseorang tak akan mudah mengalami stres apabila mengalami hal tidak menyenangkan. Menurut Kobasa (1979), aspek-aspek dalam mencapai *hardiness* meliputi komitmen, kontrol, dan tantangan.

ECC dalam penjelasannya menyampaikan, komitmen mencerminkan sejauh mana seorang individu terlibat dalam apapun yang ia lakukan. Kemudian, kontrol melibatkan keyakinan bahwa individu mampu mempengaruhi kejadian-kejadian dalam hidupnya. Sementara tantangan merupakan keyakinan bahwa perubahan merupakan bagian yang normal dari kehidupan.



”
Dengan kemampuan individu yang merencanakan hal yang realistis maka saat ia menemui suatu masalah maka akan tahu hal terbaik yang dapat ia lakukan dalam keadaan tersebut.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi *hardiness* dalam diri seseorang. Faktor pertama, kemampuan untuk membuat rencana yang realistis.

”Dengan kemampuan individu yang merencanakan hal realistis, saat menemui suatu masalah, ia akan tahu hal terbaik yang dapat dilakukan dalam keadaan tersebut.” demikian disampaikan tim ECC dalam materi yang disampaikan mengenai *hardiness*.

Selain itu, ada faktor rasa percaya diri dan positif citra diri. Individu akan lebih santai dan optimistis jika individu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Adapun jika memiliki citra diri positif, maka individu akan terhindar dari stres. Faktor lainnya adalah mengembangkan keterampilan komunikasi dan kapasitas untuk mengelola perasaan yang kuat dan impuls.

Tim ECC juga menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik umum orang yang memiliki *hardiness*. Faktor pertama, percaya bahwa mereka bisa mengendalikan dan mempengaruhi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya.

Kedua, memiliki perasaan yang dalam atau rasa komitmen yang tinggi terhadap semua kegiatan yang ada dalam hidupnya. Ketiga, menganggap perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik.



Ciri-ciri Orang yang Memiliki Hardiness

1. Sakit dan senang adalah bagian hidup

Orang yang memiliki *hardiness* menganggap sakit dan senang merupakan bagian dari hidup dan mereka mampu melalui semuanya bahkan mampu untuk menikmatinya.

2. Keseimbangan

Orang yang memiliki *hardiness* memiliki keseimbangan emosional, spiritual, fisik, hubungan antar interpersonal dan profesionalisme dalam hidup.

3. Leadership

Orang yang memiliki *hardiness* mampu bertahan dalam keadaan tertekan atau terkendali.

4. Perspektif

Orang yang memiliki *hardiness* memiliki pandangan hidup yang tidak hanya berdasarkan pemikirannya sendiri.

5. Self-knowledge

Memiliki pengetahuan diri dan kesadaran diri yang tinggi.

6. Tanggung Jawab

Orang yang memiliki *hardiness* mampu menerima tanggung jawab.

Menurut tim ECC, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seseorang untuk membangun kepribadian *hardiness*. Pertama, menetapkan misi hidup. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun misi kehidupan, membulatkan tekad, membangun visi, menciptakan wawasan, transformasi visi dan komitmen total.

Langkah kedua adalah membangun karakter. Caranya dengan membangun kesadaran diri, membangun kekuatan afirmasi, dan mengembangkan pengalaman positif. Adapun langkah ketiga adalah *self controlling*. *Self controlling* adalah kemampuan mengelola kondisi kemauan, kebutuhan, impulsif, dan dorongan dan sumber daya diri sendiri.

SKALA KEPERIBADIAN

Untuk mengetahui seberapa besar kita memiliki kepribadian *hardiness*, bisa dilakukan dengan melakukan penilaian mandiri terhadap beberapa pernyataan di bawah ini. Penilaian sesuai dengan apa yang dirasakan dengan skala 1 hingga 4 sebagai simbol dari derajat kesesuaian atas kondisi yang tertulis di setiap item dengan kondisi yang dialami. Rentang skor yang digunakan adalah 1 (Sangat Tidak Sesuai) hingga 4 (Sangat Sesuai).



1. Saya yakin dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
2. Saya berusaha mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
3. Saya sangat tertarik dengan hal-hal yang menantang.
4. Saya sulit mengambil keputusan dengan tepat pada saat saya dihipit oleh berbagai permasalahan.
5. Saya seringkali tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas.
6. Saya enggan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.
7. Saya berusaha melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu.
8. Saya menghadapi permasalahan yang terjadi secara mandiri.
9. Permasalahan dalam kehidupan merupakan kesempatan bagi saya untuk terus berkembang.
10. Saya sulit mengendalikn perasaan ketika sesuatu yang buruk terjadi.
11. Saya menghindari persoalan-persoalan yang sulit untuk diatasi.
12. Saya menghindari hal-hal yang mengandung risiko.
13. Saya mempersiapkan diri dengan baik ketika berhadapan dengan suatu masalah.
14. Saya tetap berjuang ketika menghadapi suatu masalah yang berat.
15. Saya menghadapi perubahan hidup dengan bersemangat.
16. Saya sulit menentukan sikap yang benar ketika menghadapi perubahan yang mendadak.
17. Saya menjadi malas ketika melakukan kegiatan yang penuh dengan tekanan.
18. Saya lebih suka menghindari masalah daripada menyelesaikannya. ~

Transformasi Digital untuk Membantu Pegawai BPK

**BPK MENGEMBANGKAN BPK ONE APPS
SEBAGAI APLIKASI YANG DIKEMBANGKAN
DENGAN PLATFORM MOBILE.**

Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (Renstra BPK) Tahun 2020–2024 mengamanatkan implementasi transformasi digital untuk mencapai visi dan misi BPK. Sebagai salah satu bentuk implementasi digital tersebut, BPK telah mengembangkan Digital Enterprise Architecture (DNA), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022.

Dari hal tersebut, BPK kemudian mengembangkan BPK One Apps sebagai aplikasi yang dikembangkan dengan *platform mobile*. Aplikasi itu tersedia untuk pengguna android dan iOS, dengan tujuan memudahkan pegawai mengakses layanan yang biasa digunakan melalui perangkat *mobile*. BPK One Apps diperlukan karena perangkat *mobile* lebih banyak diakses pengguna, serta dapat dilakukan personalisasi fitur dan notifikasi.

Saat ini, terdapat beberapa fitur BPK One Apps yang telah dikembangkan, yaitu fitur presensi, dimanfaatkan pengguna untuk melakukan presensi. Kemudian, fitur aktivitas untuk mencatat aktivitas harian yang telah dilakukan pegawai, fitur kalender untuk memastikan presensi dan pencatatan aktivitas telah dilakukan, disajikan dalam bentuk kalender, fitur SIAP yang memberikan informasi penugasan pemeriksaan, reviu, dan status PKP, fitur layanan TI untuk mengajukan dan memantau proses permintaan layanan TI, dan fitur izin untuk mengajukan izin dari bawahan kepada atasan.

Secara lebih detail, dalam fitur presensi, menampilkan form presensi yang digunakan untuk melakukan presensi harian pegawai BPK. Untuk melakukan presensi, pegawai dapat memilih jenis penugasan yaitu WFH, WFO, atau TL. Apabila jenis penugasan yang dipilih adalah WFO, maka pegawai dapat memilih lokasi WFO yang tersedia. Setelah memilih jenis penugasan, pegawai harus klik tombol simpan agar presensi tercatat ke dalam sistem.



Presensi yang telah disimpan akan muncul di status presensi pada beranda aplikasi. Atasan pun dapat memantau pelaksanaan presensi yang dilaksanakan oleh bawahan.

Kemudian, fitur aktivitas menampilkan form aktivitas yang digunakan untuk mencatat aktivitas harian yang telah dilakukan. Untuk mengisi aktivitas, pegawai harus memilih tanggal aktivitas yang akan diinput, memilih aktivitas yang terdaftar, memilih butir SKP yang sesuai, serta mengisi uraian aktivitas, jumlah *output*, dan progress pengerjaan. Pegawai juga dapat mengunggah lampiran yang mendukung aktivitas tersebut apabila diperlukan.

Aktivitas yang telah diinput akan ditampilkan dalam riwayat aktivitas dan status di beranda aplikasi. Atasan dapat memantau dan melakukan reviu atas aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahan.

Dalam fitur kalender, pegawai dapat memantau status presensi dan aktivitas yang dilakukan pada menu kalender. Apabila pegawai mengeklik tanggal pada kalender, maka aplikasi akan

menampilkan rincian data presensi dan aktivitas yang telah dilakukan. Fitur kalender juga menyediakan pintasan untuk menambahkan aktivitas, apabila pada tanggal tersebut pegawai belum menginputkan aktivitas. Klik *button* tambah aktivitas, maka BPK GO akan menampilkan form tambah aktivitas.

Fitur SIAP menampilkan penugasan pemeriksaan, apabila pegawai sedang melaksanakan pemeriksaan dan memanfaatkan aplikasi SIAP. Secara lebih detail, menu ini menyajikan status Program Kerja Perorangan (PKP) dan reviu atas PKP tersebut. Pemeriksa dapat memilih sub pemeriksaan aktif yang akan ditampilkan informasinya. Pada sub pemeriksaan aktif terpilih, BPK GO menampilkan informasi atas status PKP dan Status PKP Tim Pemeriksaan. Untuk mengetahui status PKP yang sedang dikerjakan, pemeriksa dapat memilih PKP yang dimaksud kemudian pilih bagian PKP yang sedang dikerjakan. Pada bagian PKP yang sedang dikerjakan, BPK GO menampilkan daftar PKP yang sedang dikerjakan.

Selain itu, fitur layanan TI menampilkan form permintaan layanan TI yang digunakan untuk menginputkan permintaan layanan atau kendala yang dialami dalam menggunakan layanan TI BPK. Untuk menginput permintaan layanan TI, pegawai harus mengisi informasi permintaan layanan TI, memilih kategori, serta mengunggah lampiran yang diperlukan. Pegawai dapat memantau status permintaan layanan TI yang telah diajukan.

Kemudian, terdapat fitur izin. Terdapat dua proses dalam fitur tersebut yaitu pengajuan izin dan persetujuan izin. Form pengajuan izin digunakan untuk mengajukan izin, untuk tiga jenis permohonan yaitu izin atasan dengan alasan di luar kedinasan (IA), izin tidak masuk kantor (I), dan izin atasan karena alasan kedinasan (ID). Atasan dapat memberikan persetujuan atas pengajuan izin oleh bawahan.

Untuk mengajukan izin, pegawai harus memilih jenis permohonan, detail jenis, tanggal izin, jam, provinsi dan kabupaten/kota pada saat melakukan izin, serta input alasan pengajuan izin. Pegawai dapat memantau status pengajuan izin yang telah diajukan.

Kemudian, BPK juga mengembangkan BPK One Web yang dapat diakses melalui go.bpk.go.id. BPK One Web akan menjadi media kerja utama *office automation* dan dapat menyediakan personalisasi fitur dan notifikasi. BPK One Web juga mempermudah akses ke semua aplikasi internal BPK. Pada tahap awal, terdapat empat fitur utama yaitu beranda, pemeriksaan, layanan *management*, dan *download mobile app*.

Beranda menyajikan ringkasan informasi bagi masing-masing pegawai terkait disposisi nota dinas, presensi, dan aktivitas yang telah dilakukan serta

penugasan pemeriksaan. Terdapat fitur Tugasku yang menyajikan informasi mengenai penugasan, baik pencatatan tugas harian yang dibuat oleh masing-masing pegawai maupun penugasan yang diberikan oleh atasan. Beranda juga menyajikan berita-berita yang perlu diketahui pegawai dan informasi lainnya, serta pengaturan *quick access*.

Fitur pemeriksaan menyajikan informasi penugasan pemeriksaan yang telah memanfaatkan SIAP. Pegawai dapat memilih salah satu sub pemeriksaan. Kemudian, pada bagian PKP, terdapat informasi tentang status PKP. Untuk mengetahui PKP yang belum dikerjakan, dapat mengklik pada status belum dikerjakan. BPK One Web akan menampilkan daftar PKP yang belum dikerjakan.

Pada fitur pemeriksaan juga terdapat SIPTL yang menyajikan informasi penugasan penelaahan tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang disampaikan oleh entitas. Kemudian, fitur layanan *management* menyediakan layanan bagi seluruh pengguna, yaitu presensi, pencatatan dan monitoring aktivitas harian, pengajuan dan persetujuan izin atasan, serta pengajuan dan monitoring layanan TI. Selain itu, fitur *download mobile app* menyediakan tautan ke halaman informasi tentang BPK GO Apps.

Pengembangan BPK One Web akan dilakukan secara berkelanjutan. Fitur yang tersedia saat ini akan terus dikembangkan untuk mendukung implementasi *office automation*. Penambahan fitur tersebut antara lain terkait dengan kepegawaian, fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, serta *data analytics*. ~





BPK Cermati Perubahan Postur APBN dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2022

ANGGARAN SUBSIDI ENERGI MENINGKAT SEBESAR 55,89 PERSEN PADA TAHUN 2022.



■ Ketua BPK, Isma Yatun

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta para pemeriksa mencermati perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. Hal ini diperlukan mengingat adanya berbagai dinamika yang terjadi di dalam negeri maupun di lingkup global.

Ketua BPK mengatakan, terdapat beberapa perubahan signifikan pada postur APBN 2022 yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran subsidi. Anggaran subsidi energi, misalnya, meningkat menjadi 55,89 persen seiring naiknya harga minyak dunia. Selain itu, terdapat perubahan alokasi anggaran untuk kompensasi bahan bakar minyak dan listrik yang meningkat sebesar 1.486,48 persen.

"Perubahan tersebut penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan strategi, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang cukup dan tepat. Selain itu, para pemeriksa juga harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menganalisis berbagai macam data dan informasi dalam rangka mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko," kata Ketua BPK saat memberikan pengarahannya pada *workshop* persiapan pemeriksaan LKPP, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2022, pertengahan Januari.

Ketua BPK menambahkan, beberapa hal yang juga perlu dicermati adalah pelaksanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung, penyelenggaraan kegiatan internasional G-20, yang dapat memengaruhi realisasi APBN tahun 2022. Ketua BPK juga mengingatkan para pemeriksa mengenai kasus-kasus yang terkait dengan hukum pada kementerian/l lembaga serta risiko dampaknya pada pertanggungjawaban anggaran.

Agar pemeriksaan berjalan maksimal, Ketua BPK meminta seluruh unit kerja pemeriksaan untuk dapat saling berkolaborasi dalam berbagi data dan informasi yang dapat memengaruhi LKPP tahun 2022.

Workshop dengan tema "Sinergi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN" yang digelar pada 12-18 Januari 2023 ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN tahun 2022. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada para pemeriksa mengenai arah dan kebijakan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2022.

Tujuan lain digelarnya *workshop* ini juga untuk memutakhirkan pemahaman para pemeriksa mengenai tiga isu utama, yaitu perkembangan standar dan kebijakan akuntansi serta sistem informasi pelaporan keuangan pemerintah pusat, kebijakan dalam pelaksanaan APBN tahun 2022, dan pengelolaan barang milik negara.

Kegiatan *workshop* turut dihadiri Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang, dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto. Selain itu, *workshop* dihadiri para pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta pejabat struktural dan fungsional pemeriksa di seluruh satuan kerja BPK Pusat sebagai peserta. ~



Kewajaran Nilai Subsidi BUMN Jadi Fokus Pemeriksaan

BPK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAPAT MENGGUNAKAN HASIL PEKERJAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) BUMN.



■ Hendra Susanto

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melakukan pemeriksaan terkait anggaran subsidi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun ini, strategi pemeriksaan akan berfokus pada kewajaran nilai subsidi.

Hal tersebut disampaikan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto saat menghadiri Rapat Kerja BTN 2023 pada 27 Januari. "Terdapat penyesuaian strategi pemeriksaan subsidi. BPK akan berfokus pada pengujian kewajaran nilai subsidi yang diajukan oleh BUMN operator kepada pemerintah," kata Hendra.

Hendra menyampaikan, BPK selama tiga tahun terakhir telah melakukan pemeriksaan pada PT BTN secara rutin. Pemeriksaan yang dilakukan, antara lain, terkait dengan pengelolaan dan perhitungan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan tahun 2019-2021, serta subsidi bunga/subsidi margin KPR Program PEN tahun 2021. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka dukungan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

"Pada tahun ini, strategi pemeriksaan BPK atas subsidi pada BUMN, dalam hal ini BTN, akan berfokus pada pengujian kewajaran subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan yang diajukan oleh PT BTN kepada pemerintah," ujar Hendra.

Hendra dalam kesempatan itu mengatakan, BPK dalam melakukan pemeriksaan dapat menggunakan hasil pekerjaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN. Ini sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya SA 610.

"Disinilah pentingnya peningkatan kolaborasi dalam pemeriksaan antara BPK dengan PT BTN, antara lain, yang telah diimplementasikan sejak akhir tahun lalu terkait pemeriksaan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bunga uang muka perumahan TA 2022 pada PT BTN."

Dengan semakin besarnya peranan APIP dan SPI BUMN yang ada di BTN dalam pemeriksaan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bunga uang muka perumahan, BPK nantinya dapat memperbesar porsi pemeriksaan pada aspek pengelolaan pendapatan, beban/biaya, dan investasi. Hendra menambahkan, selain pemeriksaan atas atas subsidi/PSO/kompensasi, kedepannya BPK akan berkolaborasi dengan SPI BUMN terkait pemeriksaan aset tetap, persediaan dan teknologi informasi.

"Kolaborasi juga dilakukan dalam bentuk diklat maupun *focus group discussion* yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan metodologi pemeriksaan," kata Hendra. ~

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**



Belajar Moralitas Hukum dari Karya Sastra Eropa Klasik



A.P. EDI ATMAJA

ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI,
BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA, BPK RI

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

SUATU NORMA YANG DIANGGAP SEBAGAI NORMA HUKUM OLEH MASYARAKAT PADA DASARNYA HANYALAH SEMATA KONVENSI SOSIAL.

Karya sastra Eropa klasik mengandung banyak nilai intrinsik yang layak dikulik. Salah satu karya sastra Eropa yang bernilai klasik dan layak dikulik ialah novel *Les Misérables* (1862). Ia merupakan karya terbesar Victor Hugo (1802–1885), sastrawan Prancis terkemuka yang paling banyak dikaji dalam studi sastra, analisis filologi, kritik sastra, biografi, terjemahan, dan adaptasi karya setelah Shakespeare (Llosa, 2004). *Les Misérables* sedikit-banyak merepresentasikan pengalaman penulisnya yang di samping seniman juga pejuang politik kawakan. Hugo pun pernah mengenyam pendidikan hukum (Academy of American Poets, 2020), sehingga karya-karyanya kerap menyajikan potret hukum yang hidup di alam kenyataan.

Les Misérables berkisah tentang kehidupan Jean Valjean, seorang bekas narapidana. Sesuai makna harfiahnya, *les misérables* dalam bahasa Prancis berarti 'malang'. Sungguh tepat judul novel ini sebab hanya karena kemalanganlah seorang manusia yang sarat akan nilai kebaikan dan keadilan dapat terlabeli sebagai narapidana. Dalam novelnya Hugo menguraikan banyak sekali peristiwa yang mengandung problem filosofis. Hugo memang tidak pernah mengklaim dirinya filsuf atau penulis karya filsafat, namun dalam karyanya ini Hugo berhasil menyajikan ide-ide penting dalam filsafat secara ilustratif dan kreatif.

KRITIK ATAS POSITIVISME HUKUM

Ide sentral *Les Misérables* sejatinya adalah kritik Hugo atas positivisme hukum yang melepaskan hukum dari moralitas. Tatkala Hugo menceritakan masa lalu Valjean yang dibui hingga sembilan belas tahun hanya karena mencuri sepotong roti untuk keluarga kakak perempuannya yang kelaparan, saat itulah kritik tengah dilancarkan. Betapa hukum ditegakkan secara hitam-putih dan sama sekali tidak memperhitungkan "alasan pemaaf" kemanusiaan di balik pelanggaran hukum.

Gagasan positivisme hukum tampak dari karya-karya pemikir Inggris abad kesembilan belas seperti John Austin dan Jeremy Bentham atau pemikir abad kedua puluh seperti Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan Joseph Raz. Pemikir positivis berpandangan bahwa, pertama, apa yang dianggap sebagai hukum dalam masyarakat tertentu pada dasarnya adalah soal fakta atau konvensi sosial. Inilah yang dinamakan 'tesis sosial' dalam positivisme hukum. Kedua, tidak terdapat keterkaitan antara hukum dan moralitas. Inilah yang disebut 'tesis pemisahan' dalam positivisme hukum (Coleman & Leiter, 2010).

Hart berpendapat bahwa dalam setiap sistem hukum, agar suatu norma dapat menjadi norma hukum, ia tidak harus mengandung nilai moral

tertentu. Suatu norma yang dianggap sebagai norma hukum oleh masyarakat pada dasarnya hanyalah semata konvensi sosial. Konvensi sosial ini dapat mencakup konvensi di antara para penguasa pembentuk hukum yang menjadikan—atau tidak menjadikan—nilai moral suatu norma sebagai syarat validitas hukumnya (Coleman & Leiter, 2010: 230). Dengan demikian, menurut Hart, hukum pada awal pembentukannya memang terlepas dari moralitas.

Hukum negara dalam sudut pandang positivisme hukum dipahami sebagai seperangkat standar yang berasal secara eksklusif dari konvensi, perintah, atau fakta sosial lainnya. Atau, seperti kata Kelsen, hukum dan kewajiban-kewajibannya adalah—dan harus merupakan hasil dari—kehendak dan paksaan seorang atasan. Kondisi ini pada akhirnya tidak menyisakan ruang bagi persyaratan konsistensi logis dalam hukum (Finnis, 2011: 99).

LABEL, STIGMA, DAN PENDISIPLINAN

Selain mengkritik positivisme hukum yang dijalankan aparaturnegara, Hugo juga mengkritik hukum yang bekerja di masyarakat dalam bentuk label dan stigma. Dikisahkan, se usai menjalani hukuman dan keluar dari penjara, Valjean berniat pulang ke kampung halaman. Di tengah perjalanan, ia ingin menyewa penginapan. Namun, penginapan manapun yang ia datangi selalu menolaknya karena ia bekas narapidana dan pemegang kertas kuning dari penjara.

Adegan ini mengilustrasikan bahwa hukum tidak dibentuk dalam ruang yang kedap sosial. Ternyata masyarakat dapat membentuk hukumnya sendiri dalam bentuk label, stigma, dan kesadaran kolektif yang, dalam kasus Valjean, sesungguhnya merupakan dampak dari sistem hukum yang rusak. Masyarakat, dalam reaksinya atas sistem hukum yang rusak tadi, bisa saja memilih membentuk hukumnya sendiri sebagai antitesis dari sistem hukum negara. Namun, masyarakat dapat juga meneguhkan sistem hukum negara dengan menginternalisasikannya ke dalam lingkungan sosial. Kemungkinan terakhir ini dapat terjadi manakala otoritas pembentuk hukum formal (negara) memiliki kedaulatan paripurna yang, dalam titik tertentu, memiliki daya paksa tinggi terhadap masyarakatnya—yang disebut Durkheim sebagai tipe

hukum represif (Vago & Barkan, 2018: 42–43).

Tepatlah apa yang dikemukakan Émile Durkheim bahwa hukuman memainkan peran penting dalam mengekspresikan kesadaran kolektif dengan maksud untuk melestarikan solidaritas sosial (Wacks, 2006: 76). Menurut Durkheim, suatu tindakan disebut kejahatan jika melanggar kesadaran kolektif. Suatu tindakan tidak mengejutkan kesadaran kolektif karena ia merupakan kejahatan tetapi tindakan itulah kejahatan karena ia mengejutkan kesadaran kolektif. Pada akhirnya, negara memperkuat kesadaran kolektif tersebut dengan menghukum mereka yang menyinggung negara itu sendiri (Wacks, 2006: 77).

Pembubuhan tato '24601' di lengan Jean Valjean sebagai penanda nomor narapidana, pemberian kertas kuning usai menjalani masa hukuman, perasaan tidak betah saat tidur di kasur yang nyaman, dan naluri untuk mengulangi kejahatan kembali (mencuri barang gereja) menunjukkan bahwa hukum, selain bekerja dengan label dan stigma, juga dioperasikan melalui pendisiplinan. Menurut Michel Foucault, tubuh manusia merupakan sasaran dari "mikrofisika" baru dari kekuasaan yang dioperasikan antara lain melalui pabrik, rumah sakit, sekolah, dan penjara (Wacks, 2006: 90) dalam bentuk pendisiplinan. Alam semesta Foucault adalah alam di mana kekuasaan pendisiplinan merasuki hampir setiap elemen kehidupan sosial. Negara mengatur dan mengarahkan kebijakan untuk mengendalikan pelbagai macam ancaman terhadap ketertiban sosial. Kesetaraan formal, demikian Foucault, adalah tabir asap yang di belakangnya terletak kekuasaan pendisiplinan yang menjadi ciri negara posmodern (Wacks, 2006: 91).

Solusi dari krisis dalam hukum dan masyarakat tersebut, menurut Hugo, adalah penghormatan akan humanisme. Dalam *Les Misérables*, hal tersebut tampak dari sikap humanis Uskup Myriel tatkala Jean Valjean hendak dibui kembali karena kabur dari gereja dengan barang curian. Dengan penuh kasih, Uskup Myriel berkata, "*Forget not, never forget that you have promised me to use this silver to become an honest man [...] Jean Valjean, my brother: you belong no longer to evil, but to good. It is your soul that I am buying for you. I withdraw it from dark thoughts and from the spirit of perdition, and I give it to God!*" ~

Referensi

- Academy of American Poets, "Victor Hugo", <https://poets.org/poet/victor-hugo>, diakses 9 Oktober 2022.
- Coleman, Jules L. dan Leiter, Brian. "Legal Positivism" dalam Dennis Patterson, ed., *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory [Second Edition]* (West Sussex: Blackwell Publishing, 2010).
- Finnis, John. *Philosophy of Law: Collected Essays [Volume IV]* (New York: Oxford University Press, 2011).
- Hugo, Victor. *Les Misérables [Translated by Charles E. Wilbourn]* (New York: The Modern Library, 1992).
- Llosa, Mario Vargas. *The Temptation of the Impossible: Victor Hugo and Les Misérables [Translated by John King]* (New Jersey: Princeton University Press, 2004).
- Vago, Steven dan Barkan, Steven E. *Law and Society [Eleventh Edition]* (New York: Routledge, 2018).
- Wacks, Raymond. *Philosophy of Law: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2006).

1-4
Ketua BPK
Isma Yaton
menghadiri *entry
meeting* serta
menandatangani
MoU antara
BPK RI dan
JAN Malaysia,
30 Januari 2023.



5-6

Audiensi Ketua BPK Isma Yaton dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, 13 Januari 2023. Turut hadir Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit.

7-8

Ketua BPK Isma Yaton didampingi Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2022 (unaudited). LKTBI Tahun 2022 diserahkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di Auditorium BPK, pada Selasa (31/1).





9 Entry meeting di lingkungan AKN I dihadiri Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, 26 Januari 2023.

10 Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh menghadiri entry meeting KemenPUPR. Turut hadir Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, 24 Januari 2023.



11-13 Entry meeting di lingkungan AKN III dihadiri oleh Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi, 11 Januari 2023.

14-16 Audiensi Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 30 Januari 2023.

17-18 Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto menghadiri acara Team Building AKN VII, 18-20 Januari 2023.





KUIS

Dalam majalah *Warta Pemeriksa* edisi Desember 2022 disebutkan bahwa 4 satker di BPK memperoleh predikat WBBM, satker mana sajakah itu?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



SEMAKIN MUDAH
MENGAKSES INFORMASI
MELALUI
BERBAGAI PLATFORM



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



@bpkriofficial



www.bpk.go.id

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



MAKIN **KUAT**
MAKIN **HEBAT**